



## Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah terhadap Perilaku Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai

Bartolomeus Marulitua Simanjourang<sup>1\*</sup>, Lestari Lumban Batu<sup>2</sup>, Rouli Lumban Batu<sup>3</sup>, Thereza Dwi Ningrum Siburian<sup>4</sup>, Halking<sup>5</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: <sup>1</sup>[bartolomeus350@gmail.com](mailto:bartolomeus350@gmail.com), <sup>2</sup>[lestarilumbanbatu34@gmail.com](mailto:lestarilumbanbatu34@gmail.com), <sup>3</sup>[roulilumbanbatu00@gmail.com](mailto:roulilumbanbatu00@gmail.com),  
<sup>4</sup>[therezasiburian777@gmail.com](mailto:therezasiburian777@gmail.com), <sup>5</sup>[halking123@unimed.ac.id](mailto:halking123@unimed.ac.id)

\*Penulis Korespondensi: [bartolomeus350@gmail.com](mailto:bartolomeus350@gmail.com)

**Abstract.** The waste problem in urban areas, including in Tegal Sari Mandala I Village, Medan Denai District, remains a serious issue. Although the government has established waste management policies through national and regional regulations, implementation on the ground often faces obstacles such as inadequate communication, limited resources, and low public awareness. This study aims to analyze the implementation of waste management policies and its impact on community behavior, based on public policy implementation theory, specifically George C. Edwards III's model, which includes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. Community behavior is analyzed through indicators such as waste disposal habits, compliance with rules, waste segregation, and participation in cleanliness activities. The research method used is a survey with a quantitative approach, involving 97 household heads in Tegal Sari Mandala I Village, selected through proportional random sampling. Data was collected through questionnaires, interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted descriptively using descriptive data analysis and correlation tests to identify the relationship between policy implementation and community behavior. The findings show a significant relationship between the implementation of waste management policies and community behavior, with a Pearson correlation value of  $r = 0.709$  and a significance level of 0.000. This indicates that better policy implementation leads to more positive community behavior in waste management, emphasizing the importance of improved policy communication, infrastructure strengthening, and coordination among relevant institutions.

**Keywords:** Community behavior; Policy implementation; Public policy; Waste management; Waste management policies.

**Abstrak.** Masalah sampah di perkotaan, termasuk di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, masih menjadi isu serius. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan sampah melalui regulasi nasional dan daerah, implementasi di lapangan sering menghadapi hambatan seperti kurangnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap perilaku masyarakat, dengan berlandaskan teori implementasi kebijakan publik, khususnya model George C. Edwards III yang melibatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perilaku masyarakat dianalisis melalui indikator kebiasaan membuang sampah, kepatuhan terhadap aturan, pemilahan sampah, dan partisipasi dalam kegiatan kebersihan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan sampel sebanyak 97 responden kepala keluarga di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, yang dipilih menggunakan teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara implementasi kebijakan dan perilaku masyarakat, dengan nilai korelasi Pearson  $r = 0,709$  dan signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan implementasi kebijakan akan berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang menekankan pentingnya peningkatan komunikasi kebijakan, sarana prasarana, dan koordinasi lembaga terkait.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan; Kebijakan publik; Manajemen sampah; Pengelolaan sampah; Perilaku masyarakat.

### 1. LATAR BELAKANG

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat berkontribusi pada peningkatan timbunan sampah

setiap tahunnya. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 69,9 juta ton, dengan komposisi terbesar berasal dari sampah sisa makanan (41,60%) dan sampah plastik (18,71%). Dari sisi sumber, rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar dengan proporsi 44,37%. Angka-angka ini menunjukkan urgensi penanganan sampah sebagai persoalan nasional yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak serius. Dari aspek lingkungan, sampah yang menumpuk berpotensi mencemari tanah, udara, dan udara. Dari aspek kesehatan, lingkungan yang tidak bersih memicu berbagai penyakit seperti diare, ISPA, dan penyakit kulit. Sementara dari aspek sosial-ekonomi, kondisi lingkungan yang kotor dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi estetika kawasan, bahkan menurunkan nilai properti. Oleh karena itu, persoalan sampah bukan hanya terkait persoalan teknis pengelolaan, tetapi juga merupakan persoalan kebijakan publik yang menuntut adanya regulasi, perencanaan, serta partisipasi aktif masyarakat (Sholihah, 2020).

Kesadaran terhadap urgensi tersebut mendorong pemerintah Indonesia merumuskan regulasi pengelolaan sampah yang lebih sistematis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus berlandaskan prinsip *pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang* (3R) serta mendorong pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Aturan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang menekankan perlunya sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang terintegrasi dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat (Puspita et al., 2023). Namun meskipun kerangka regulasi telah tersedia, penerapannya di banyak daerah masih menemui kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya anggaran, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa juga menghadapi permasalahan sampah yang cukup kompleks. Volume sampah yang dihasilkan kota ini mencapai 1.800–2.000 ton per hari, sementara kapasitas armada transportasi serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun belum mampu mengimbangi jumlah sampah tersebut. Kondisi ini menuntut adanya strategi pengelolaan yang tidak hanya bergantung pada sistem pembuangan akhir, tetapi juga partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah (Situmeang et al., 2023).

Salah satu wilayah di Kota Medan yang menghadapi tantangan serupa adalah Kelurahan Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai. Wilayah yang tergolong padat penduduk ini mengalami peningkatan volume sampah seiring dengan perkembangan aktivitas sosial dan

ekonomi masyarakat. Pengamatan awal menunjukkan bahwa masih banyak warga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik, bahkan sebagian warga masih melakukan praktik pembakaran sampah. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat sebagai pelaksana kebijakan utama di lapangan.

Pemerintah Kota Medan melalui kelurahan dan kecamatan sebenarnya telah melakukan berbagai upaya seperti penyediaan tempat sampah komunal, transportasi rutin, serta sosialisasi pentingnya pemilahan sampah. Namun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada penerimaan dan kesadaran masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh perubahan perilaku masyarakat sebagai mitra utama pemerintah.

Dalam kajian kebijakan implementasi, Model George C. Edwards III menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila keempat variabel tersebut tidak berjalan optimal, tujuan kebijakan tidak akan tercapai (Setyawan et al., 2021). Dalam konteks Kelurahan Sari Mandala I, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menyampaikan informasi secara jelas, menyediakan sarana prasarana yang memadai, membangun komitmen masyarakat, serta menciptakan mekanisme kelembagaan yang mendukung.

Penelitian mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Sari Mandala I penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada telah mampu mempengaruhi perilaku masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah masyarakat memahami pentingnya pemilahan sampah, apakah fasilitas pendukung memadai, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi, perlu dijawab secara sistematis melalui penelitian ilmiah.

Pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Sari Mandala I didasarkan pada karakteristik wilayah yang merepresentasikan kawasan perkotaan padat penduduk dengan permasalahan sampah yang kompleks. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berbasis pada perilaku masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di Kelurahan Sari Mandala I menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif

mengenai tantangan dan peluang pengelolaan sampah berbasis kebijakan publik di wilayah perkotaan, serta menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi keinginan pengelolaan sampah di Kota Medan secara khusus, dan di Indonesia secara umum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara objektif, terukur, dan dapat diuji secara statistik. Menurut Mulyadi (2011), penelitian merupakan suatu proses sistematis dan kritis dalam upaya menemukan fakta-fakta serta memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul. Dalam konteks ini, metode survei dipandang relevan karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data empiris dari kelompok responden yang relatif besar melalui instrumen berupa kuesioner.

Kerlinger (Emilia Kurniawati et al., 2025) menyatakan bahwa penelitian survei merupakan metode yang efektif untuk memperoleh informasi faktual mengenai sikap, pendapat, dan karakteristik tertentu dari individu dalam populasi. Oleh karena itu, metode ini dipilih untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah serta pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai. Pendekatan kuantitatif juga memungkinkan data yang diperoleh digeneralisasikan sehingga dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih komprehensif.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah, baik dari aspek sarana prasarana, keterlibatan masyarakat, serta efektivitas kebijakan kebersihan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan sebagai objek kajian implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap, meliputi persiapan instrumen, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner, analisis data, hingga penyusunan laporan. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian berlangsung dalam periode yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala I yang berjumlah sekitar 12.000 jiwa dengan total 3.000 kepala keluarga (KK). Karena ukuran populasi yang cukup besar, peneliti menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Berdasarkan perhitungan, sampel yang diperoleh berjumlah 97 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik proporsional random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk

di setiap lingkungan. Teknik ini dipilih agar sampel yang diperoleh mampu mewakili kondisi masyarakat secara lebih merata sehingga data yang dihasilkan memiliki tingkat representasi yang baik.

Penelitian ini terdiri atas dua variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) adalah Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Kedua variabel dijelaskan melalui definisi operasional untuk memastikan bahwa konsep-konsep tersebut dapat diukur secara empiris.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui: Observasi untuk mengetahui kondisi sarana prasarana kebersihan dan perilaku masyarakat di lapangan, Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dari aparat kelurahan, ketua lingkungan, atau pengelola bank sampah, dan Kuesioner yang menjadi instrumen utama dalam penelitian, disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan menggunakan Skala Likert 1–5. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan kegiatan kebersihan, statistik kelurahan, literatur, dan sumber resmi lainnya. Instrumen penelitian berupa kuesioner (angket) tertutup yang berisi pernyataan terkait penerapan kebijakan pengelolaan sampah maupun perilaku masyarakat. Setiap pernyataan disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Responden yang diminta memberikan jawaban menggunakan skala Likert yang menggambarkan tingkat persetujuan mereka terhadap setiap pernyataan. Instrumen yang disusun agar mampu menghasilkan data yang terukur dan mudah dianalisis secara statistik.

Teknik analisis data dilakukan dalam dua tahap Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden terhadap variabel penelitian. Hasil analisis meliputi perhitungan skor total, nilai rata-rata, distribusi frekuensi, serta kategori tingkat implementasi kebijakan dan perilaku masyarakat; kedua, Uji korelasi pearson dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel implementasi kebijakan (X) dan perilaku masyarakat (Y). Nilai koefisien korelasi dianalisis untuk menentukan tingkat kekuatan hubungan, apakah sangat lemah, lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Pengujian signifikansi dilakukan pada taraf 0,05 untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tegal Sari Mandala I Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang cukup dinamis. Keberagaman aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan rumah tangga, perdagangan kecil, hingga layanan sosial, menghasilkan volume sampah yang cukup besar setiap hari. Kondisi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai permasalahan strategis yang perlu ditangani secara serius, baik oleh pemerintah kelurahan maupun oleh masyarakat sebagai pelaku langsung dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Secara geografis dan sosial, Kelurahan Tegal Sari Mandala I memiliki karakteristik lingkungan organisasi yang heterogen. Terdapat area organisasi padat penduduk, ruang usaha masyarakat, hingga fasilitas pelayanan publik. Dengan karakteristik demikian, pemerintah kelurahan telah mengupayakan sejumlah kebijakan dan program pengelolaan sampah yang meliputi penyediaan sarana tong sampah terpilah, sosialisasi terkait pentingnya kebersihan, kegiatan kerja bakti rutin, serta pengembangan bank sampah sebagai upaya mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajiban menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, serta berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan.

Penelitian ini melibatkan 97 responden yang terdiri dari 49 perempuan dan 48 laki-laki. Responden dipilih berdasarkan karakteristik populasi dan kesediaan berpartisipasi dalam penelitian. Mereka mengisi kuesioner yang memuat 32 item pernyataan yang mengukur dua variabel utama: (1) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah sebagai variabel X dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi; serta (2) Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagai variabel Y yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji korelasi Pearson yang menunjukkan nilai  $r = 0,709$  dengan signifikansi  $0,000$ . Nilai signifikansi yang lebih kecil dari  $0,05$  menandakan bahwa hubungan tersebut bersifat signifikan, sedangkan nilai korelasi yang berada pada kategori kuat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang baik secara empiris berkaitan dengan peningkatan perilaku positif masyarakat dalam mengelola sampah. Korelasi positif ini

menunjukkan bahwa semakin efektif kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan, semakin baik pula respon dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara kualitas pelaksanaan kebijakan dan perubahan perilaku masyarakat. Kebijakan komunikasi yang jelas dan konsisten terbukti menentukan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban menjaga kebersihan. Sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan warga, pemberitahuan kelurahan, maupun media informasi lokal membantu masyarakat mengetahui aturan pembuangan sampah, jadwal transportasi, dan cara memilah sampah. Pada saat masyarakat memahami tujuan kebijakan dan manfaatnya, mereka lebih terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Selain komunikasi, ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan juga berpengaruh penting. Dalam penelitian ini, masyarakat memberikan respons yang lebih baik ketika fasilitas seperti tong sampah terpilah, gerobak sampah, dan keberadaan petugas kebersihan berfungsi secara optimal. Sarana yang memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyesuaikan perilaku mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, seperti aparat kelurahan dan petugas kebersihan, juga menjadi faktor penentu. Petugas yang disiplin, responsif, dan memiliki komitmen dalam menjalankan tugas terbukti mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Wawancara dan observasi lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat lebih patuh ketika petugas secara konsisten memberikan imbauan, melakukan pengawasan, atau bahkan memberi contoh perilaku bersih. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan bahwa sikap pelaksana sangat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan.

Struktur birokrasi yang jelas juga mendukung implementasi kebijakan. Adanya alur kerja, tugas pokok, dan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah membuat proses pelaksanaan kebijakan lebih terarah dan terkoordinasi. Koordinasi antar perangkat kelurahan, termasuk lingkungan, kepala lingkungan, dan petugas kebersihan, juga berperan penting dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik.

Temuan ini sejalan dengan teori kebijakan implementasi George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh aspek empat: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut terbukti hadir dan berpengaruh dalam konteks Kelurahan Tegal Sari Mandala I. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat empiris tetapi juga memperkuat landasan teoritis mengenai pentingnya penerapan kebijakan dalam membentuk perilaku masyarakat.

Perilaku masyarakat dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek tindakan, tetapi juga dari aspek pengetahuan dan sikap. Masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang dampak sampah cenderung memiliki sikap positif terhadap kebersihan, dan sikap tersebut pada akhirnya mendorong tindakan nyata yang lebih baik dalam pengelolaan sampah. Hal ini menegaskan bahwa perilaku kebersihan merupakan hasil dari proses yang berkelanjutan, dipengaruhi oleh informasi, pengalaman, serta dukungan lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Tegal Sari Mandala I berjalan cukup baik dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat. Meskipun demikian, beberapa hal masih perlu ditingkatkan, seperti intensitas sosialisasi, pemerataan fasilitas, pembinaan petugas kebersihan, serta peningkatan koordinasi antar unsur kelurahan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih, teratur, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku masyarakat di Kelurahan Tegal Sari Mandala I. Uji korelasi menghasilkan nilai  $r = 0,709$  dengan tingkat signifikansi  $0,000$ , yang mengindikasikan bahwa keterlaksanaan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semakin baik pelaksanaan kebijakan yang mencakup aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi, maka semakin positif pula respon dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meskipun kebijakan telah memiliki arah yang jelas, implementasinya di lapangan belum mencapai tingkat optimal. Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat masih belum memahami peran serta tanggung jawabnya, sementara keterbatasan sarana prasarana seperti tempat sampah terpilah, TPS yang memadai, dan armada pengangkut menimbulkan kendala dalam penerapan perilaku pengelolaan sampah. Selain itu, mekanisme pengawasan yang belum dilakukan secara konsisten juga menghambat efektivitas kebijakan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Dalam praktiknya, perilaku masyarakat menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian besar warga sudah mulai menunjukkan kesadaran dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun tingkat partisipasi dalam kegiatan kebersihan serta praktik pemilahan sampah rumah tangga masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak dapat dicapai semata-mata melalui adanya



aturan, melainkan membutuhkan dukungan penuh dari pelaksana kebijakan dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah merupakan hasil sinergi antara pemerintah kelurahan sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai subjek penerima kebijakan. Ketika pemerintah mampu menghadirkan komunikasi yang jelas, menyediakan sarana yang mendukung, sikap responsif dalam pelaksanaan, serta menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk membangun perilaku yang berorientasi pada kebersihan dan kesejahteraan lingkungan. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Kiki, P., Utomo, P., & Rahayu, D. (2015). Perilaku masyarakat dalam membuang sampah di tempat penampungan sementara (TPS) di Kecamatan Pontianak Barat Kota. *Perilaku Masyarakat*, 1–10.
- Ahaliki, B., Bau, R. T. R., A, H., Engelen, A., Juniarti, G., Indrawan, & Maryati, S. (2025). Assessing the community practices and perceptions on waste sorting in urban areas of Indonesia: A case study in Gorontalo City. *Geographica: Science & Education Journal*, 7(1), 35–46. <http://usnsj.id/index.php/geographica>
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Behavior, C., & Waste, I. N. (2019). Indonesian Journal of Global Health Research, 2(4), 357–364. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v2i4.250>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Elsy Nila Sari Situmeang, Khairun Nisa, Ramadhan Fitriani, Meilinda Suriani Harefa, & Syukrie Hidayat. (2023). Permasalahan pengelolaan sampah Desa Tegal Sari Kel. Mandala I Medan Denai, Kota Medan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v3i1.2244>
- Emilia Kurniawati, & Sulastrri Rini Rindrayani. (2025). Pendekatan kuantitatif dengan penelitian survei: Studi kasus dan implikasinya. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(1), 65–69. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.596>
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Mulyadi, M. (2011). Quantitative and qualitative research and basic rationale to combine them. *Journal of Communication and Media Studies*, 15(1), 128.
- Norival, A. (2018). Perilaku masyarakat di bagian tengah Batang Ino terhadap sampah di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Buana*, 2(1), 262. <https://doi.org/10.24036/student.v2i1.75>

- Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.5807>
- Roosa, L. C. (2024). Analysis of public perceptions and participation in household waste management in the working area of waste management technical implementation unit of Tumpang District Malang Regency. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 14(2), 61–69. <https://doi.org/10.21776/ub.jp.al.2023.014.02.03>
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i2.774>
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian tentang pengelolaan sampah di Indonesia. *Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia*, 03(03), 1–9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/35038>
- Suhendra, & Lestari, T. (2024). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Analisis implementasi kebijakan program Kampung Saber (Sabilulungan Bersih) di Desa Margamekar oleh Dinas Lingkungan. 4(3), 1952–1965.